

Peran Perserikatan Bangsa – Bangsa Dalam Menengahi Konflik

Rusia Dan Ukraina

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Lembaga – Lembaga Internasional

Dosen Pengampu : Dr. H. Ija suntana, M.Ag.



Disusun oleh :

Asep Daenuri

1193030013

HTN VI/A

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrahmanirahim

Puji dan syukur kita sama – sama panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat hikmahnya dan kasih sayang serta karuniaanya allhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas makalah ini tepat waktu. Shalawat dan salam semoga tercurah dan akan selalu berlimpah kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulisan makalah ini dibuat untuk memenuhi Tugas mata Kuliah Lembaga -Lembaga Internasional, Pada kesempatan kali ini penulis mengangkat judul “ **Peran Perserikatan Bangsa – Bangsa Dalam Menengahi Konflik Ukraina Dan Rusia**”

Penulis mengucapkan banyak – banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Makalah ini, Baik materi ataupun non materi.

Dalam penulisannya penulis menyadari makalah ini teramat jauh dari kata sempurna, mungkin nantinya pembaca banyak menemukan kekeliruan atau kerancuan dalam diksi dan kalimat dalam makalah ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat berarti sekali bagi penulis demi memperbaiki makalah ini. Terakhir penulis berharap semoga makalah ini dapat berguna dan mendatangkan manfaat bagi para pembaca.

Sukabumi, 3 Juni 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Apa yang menjadi latar belakang perang	3
B. Sejarah Ukraina dan Rusia	5
C. Peran PBB dalam menengahi konflik Ukraina dan Rusia.....	8
BAB III PENUTUP	12
A. Kesimpulan	12
DAFTAR PUSTAK.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang dunia pertama telah penduduk dunia lewati dengan begitu banyak pengorbanan baik harta, tempat tinggal, kedudukan, dan nyawa tak terhitung lagi jumlahnya. Tercatat pada tanggal 28 juni 1914 meletuslah perang dunia pertama menjadikan dunia terbagi menjadi dua blok yakni blok entente dan sentral. Perang dunia kedua dimulai oleh invasi jerman atas polandia pada tanggal 1 september 1939 perang ini juga menimbulkan kerugian yang teramat banyak bagi umat manusia, selanjutnya uni soviet dan amerika serikat sebagai blok sekutu pemenang perang dunia kedua menjadi negara adidaya yang keduanya berlomba lomba menanamkan pengaruh ideologinya kepada negara lain maka peristiwa itu disebutlah perang dingin.

Perang dingin menjadi bentuk perjuangan timur dan barat atau sebagai perjuangan antara camp sosialis dan imperialis. struktur bipolar sesuai perang ini juga merupakan sebab dari perang dingin, jika super power dalam berhadapan satu sama lain secara positif mengetahui hanya lawannya yang dapat menjadi musuh berbahayanya. maka dalam situasi demikian itu sangat diperlukan adanya diplomasi yang handal.

Peperangan selalu mengisi sejarah umat manusia dimana segala sesuatunya disana dipertaruhkan seperti kata jenderal clausewitz perang adalah suatu kelanjutan dari politik dengan “cara cara lain” sejak lama di masa lalu. Yang dimaksud dengan “cara cara lain“ di sini adalah digunakannya kekuatan senjata. Dengan demikian, hakikat perang menurut clausewitz adalah pertarungan antara dua kekuatan yang saling bertentangan dengan menggunakan kekerasan senjata. Yang dimaksud dengan kekerasan senjata ialah menonjolnya peranan angkatan bersenjata sebagai sarana untuk menyelesaikan persengketaan tanpa mengecilkkan arti peranan kekuatan-kekuatan yang lain, seperti kekuatan politik, ekonomi, psikologis, dan lain sebagainya (lemhannas, 1988: 218).

Kita lihat lagi Fenomena hari ini dimana konflik Rusia dan Ukraina semakin harinya makin memanas, serangan serangan militer telah dilancarkan oleh Rusia menyebabkan kota kota di ukraina hancur dan beberawa nyawa masyarakatnya melayang. Serentetan

kejadian ini bisa menjadi percikan kecil untuk menimbulkan perang yang lebih besar sebagaimana perang-perang yang terjadi sebelumnya, umat manusia sekali lagi harus mempersiapkan segala sesuatunya demi mempertahankan eksistensi manusia.

Persatuan Bangsa - Bangsa (PBB) memiliki peranan penting dalam perdamaian atas pertikaian antar Negara. Sejarah membuktikan bahwa Sejak berakhirnya perang dunia kedua, hampir seluruh negara dan organisasi internasional sepakat bahwa operasi perdamaian PBB dalam penyelesaian konflik perlu meliputi proyek Peacemaking Peacekeeping secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan meminimalisir kekerasan dan ancaman. PBB sebagai organisasi internasional harus bisa menengahi dan secepatnya harus bisa mendamaikan dua negara yang sedang berkonflik yakni Rusia Dan Ukraina.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. PBB dan perang?
2. Sejarah Ukraina dan Rusia ?
3. Peran lembaga internasional menengahi konflik ini?
- 4.

B. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka makalah ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kaitan Perserikatan Bangsa – Bangsa dan Perang.
2. Untuk mengetahui asal muasal terbentuknya Negara Ukraina dan Rusia.
3. Untuk mengetahui peran Lembaga Internasional untuk menengahi Konflik ini Khususnya Perserikatan Bangsa – Bangsa.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perserikatan Bangsa -Bangsa Dan Perang

Pada tahun 1945 terbentuklah suatu organisasi internasional bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), munculnya PBB setelah kehancuran Perang Dunia Kedua membawa suatu misi utama yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan dari PBB membentuk misi tersebut adalah dengan harapan untuk mencegah terjadinya konflik, membantu pihak-pihak yang terlibat akan konflik dan membantu untuk mewujudkan bentuk perdamaian sebagai penjaga perdamaian dan dengan PBB diyakini akan menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan bertahannya dan terus berkembangnya perdamaian antar negara. Di dalam PBB, yang memiliki otoritas atau tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan PBB.

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat global yang terpenting masa kini. Hal yang menjadi langkah awal terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini adalah saat Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, mengadakan pembicaraan khusus yang menghasilkan deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan, perdamaian dunia. Sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi. Organisasi Internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Oleh sebab itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu organisasi internasional juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud.

Perkembangan sejarah organisasi internasional tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional. Pada periode hukum internasional klasik ketika negara sebagai satu satunya subjek hukum internasional, perkembangan organisasi internasional belum begitu dominan dalam hubungan antar bangsa. Guna mencegah terjadinya instabilitas, dibentuklah suatu kerjasama yang dinamakan Liga Bangsa-Bangsa yang dilatarbelakangi oleh karena adanya perselisihan dan peperangan antarumat manusia. Sebelum PBB didirikan, sudah didirikan League of Nations atau "Liga Bangsa-Bangsa" pada tanggal 10 Januari 1920. Perjanjian Versailles merupakan perjanjian yang mendasari didirikannya Liga Bangsa-Bangsa ini.

Perang dalam bahasa arab disebut qitaal (لِاتِق) , harb (بِرْح) , atau ghazwah (قَوْزِغ).

Dalam Islam terdapat sebuah istilah yang lebih umum yaitu jihad. Ketiga sinonim kata tersebut qitaal, harb, dan ghazwah (pertempuran, peperangan, dan ekspedisi) merupakan hal yang sering dibicarakan dalam kalangan ulama' fiqh, yaitu jihad dalam artian khusus perang melawan musuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perang berarti "Permusuhan antara dua negara, bangsa, agama, suku, dan lain sebagainya, sebagai tambahan, perang merupakan pertempuran bersenjata antara dua pasukan". Perang adalah perkelahian antar kelompok dimulai sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Gary D Solis 2010 mengatakan bahwa bukti tersebut ditemukan melalui suatu lukisan gua, tentang sekelompok pemanah dalam suatu konflik yang berumur 10.000 tahun yang lalu.²² Perang adalah perkelahian dalam skala besar, merupakan kelanjutan dari kebijakan dalam bentuk lain. Sehingga perang memiliki makna yang sangat luas baik perang dalam bentuk fisik (menggunakan kekuatan/hard/power/force) maupun non fisik (soft power).

Faktor penyebab terjadinya perang Menurut Thomas Lindemann, ada 4 memotivasi terjadinya perang,

1) Prestige (Kebanggaan)

2) Antipathy (antipati) yang merupakan perbedaan identitas yang sangat mencolok.

3) Universal dignity (harga diri universal/kehormatan) yaitu perang yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap standar universal kedaulatan negara.

4) Particular dignity (harga diri tertentu)

Adapun menurut penulis sendiri penyebab perang ada beberapa faktor yang pertama merasa suku atau golongannya lebih superior daripada yang lain, kedua mempertahankan kekuasaan, cinta kesukuan yang teramat dalam dan mempertahankan eksistensi kelompoknya. Dari penjelasan diatas dapat kita rumuskan kaitan antara perserikatan bangsa bangsa dengan perang dimana pembentukan PBB sendiri se usai terjadinya perang dunia ke dua membawa pesan perdamaian dan keamanan nasional disisi lain perang merupakan serangkaian proses untuk mempertahankan kekuasaan, mempertahankan eksistensi kelompok dan golongan. Perang juga bukan hanya dilakukan dengan perlawanan fisik ataupun angkatan militer belaka perang juga bisa dalam bentuk lain seperti perang ideologi perang pasar oleh karena itu PBB sebagai organisasi internasional diharapkan bisa mencegah timbulnya konflik dan peperangan.

B. Sejarah Ukraina dan Rusia

Hubungan Rusia dan Ukraina memiliki sejarah perjalanan yang sangat panjang. Ukraina sangat berperan penting dalam lahirnya kekaisaran Rusia pada abad ke 9, hal ini menjadikan Ukraina sebagai maskot para Tsar Rusia sehingga masa keruntuhan akibat Revolusi Bolshevik tahun 1917. Pada abad ke 16 Ukraina pernah dikuasai oleh Polandia dibawah Dinasti Rumanov, Rusia membantu membebaskan rakyat Ukraina dari dominasi Polandia yang terjadi pada tahun 1648. Hubungan antara Rusia dan Ukraina pada periode Uni Soviet dalam rangkaian sejarah Rusia. Pada mulanya Ukraina sempat mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 25 Januari 1918, akibat dari Perang Saudara yang terjadi pada tahun 1918 – 1920 membuat Ukraina mendeklarasikan dirinya untuk bergabung dengan Uni Soviet (USSR – Union of Soviet Socialist Republics).

Uni Soviet secara resmi didirikan oleh Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin) pada tanggal 30 Desember 1922. Dalam perkembangannya terdapat 15 negara yang berasal dari Rusia, Asia Tengah, Eropa Timur, Negara Baltik, dan Kauskasus Selatan yang turut bergabung dalam negara Federasi Uni Soviet yakni : Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estoni, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Pada masa Uni Soviet antara Rusia dan Ukraina secara tidak langsung telah terlibat hubungan diplomatik, namun kedua negara tersebut juga pernah terlibat dalam sebuah konflik. Pada tahun 879 M kerajaan Rusia yang dipimpin oleh pangeran Oleg meluaskan pemerintahannya hingga ke wilayah utara dan menguasai Kiev. Pangeran Oleg selanjutnya mempersatukan Novgorod dan Kiev, dan menamakan kerajaan ini dengan sebutan Rus Kiev. Kota Kiev ditempatkan sebagai Ibukota dari kerajaan Rus Kiev. Namun di abad ke -12, pangeran Rus Kiev mendapat serangan dari bangsa Mongol. Serangan tersebut menyebabkan keruntuhan Rus Kiev hingga akhirnya terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil.

Pada tanggal 14 Mei 1896 dinobatkan Nicholas II (Nikolai Alexandrovich Romanov) sebagai Tsar dalam Kekaisaran Rusia. Ia adalah Tsar terakhir dalam Kekaisaran Rusia. Pada kepemimpinannya, kebencian rakyat semakin memuncak akibat tindakan otoriter yang dilakukan Tsar Nicholas II ditambah lagi keluarga Romanov telah memerintah Rusia melalui hak turun temurun selama tiga abad. Rakyat turun ke jalan menuntut turunnya Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahannya. Revolusi pun pecah pada tahun 1917 yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran Rusia. Setelah runtuhnya kekaisaran Rusia, Rusia dan Ukraina menjadi negara serikat yang terbentuk Republik Sosialis Federasi Soviet. pada 28 Desember 1922 sebuah

konferensi di hadiri oleh delegasi berkuasa penuh yang berasal dari RSFS Rusia dan RSFS Transkaukasia, RSFS Ukraina dan RSFS Belarusia menyetujui pendirian Persatuan Republik Sosialis Soviet (Uni Soviet) diakui oleh Imperium Inggris. Uni Soviet tergabung dalam blok keamanan sekutu dan memiliki andil besar selama perang dunia ke II.

Berakhirnya perang dunia ke II pada tahun 1947 yang dimenangkan oleh pihak sekutu, membawa Amerika Serikat dan Uni Soviet tampil sebagai negara Superpower. Namun kedua negara ini juga mempunyai perbedaan dalam pandangan ideologi. Amerika Serikat dengan paham kapitalis – liberal sedangkan Uni Soviet dengan ideologi Komunis. Perbedaan ini membawa kedua negara ini berseteru dan memicu terjadi Perang Dingin. Perang Dingin ini berakhir dengan kekalahan Uni Soviet dari Amerika Serikat. Kekalahan ini menyebabkan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan diikuti dengan berdirinya negara – negara bagian yang ada di Uni Soviet sebagai negara yang merdeka. Salah satu negara tersebut adalah Ukraina yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 24 Agustus 1991. Walaupun telah memperoleh kemerdekaannya dari Uni Soviet, Ukraina masih berada dibawah pengaruh Rusia.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia dan Ukraina berdiri sendiri dan menjadi negara yang merdeka kedua negara tersebut saling mengakui kedaulatan antar negara masing - masing. Pada tanggal 14 Februari 1992, Rusia dan Ukraina mendirikan hubungan diplomatik antar dengan penandatanganan protokol pembentukan hubungan diplomatik antar kedua. Rusia dan Ukraina mengirimkan duta besar negaranya sebagai bentuk hubungan diplomatik.

Pada tanggal 31 Mei 1997 disepakati bersama mengenai Perjanjian Persahabatan, Kerjasama dan Kemitraan antara Rusia dan Ukraina. Dalam kesepakatan 1997 tersebut ada 380 dokumen yang ditandatangani oleh kedua negara. Kesepakatan tersebut juga melahirkan hubungan bilateral dalam bidang sosial, militer, ekonomi, dan politik. Namun kerjasama ekonomi yang paling memainkan peran penting dalam hubungan kedua negara ini. Namun pada tahun 2004, terjadi rangkaian protes dan even politik yang terjadi di Ukraina mulai akhir November 2004 hingga Januari 2005. Demonstrasi besar – besaran di Ukraina ini terjadi karena korupsi yang melilit selama bertahun – tahun pemerintahan presiden Leonid Kuchma. Hal ini menyebabkan presiden Ukraina Leonid Kuchma harus mengundurkan diri dan digantikan oleh presiden Viktor Yuschenko yang memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2005. Sejak saat itu hubungan politik antara Rusia dan Ukraina sering kali mengalami pasang surut. Hal ini dikarenakan Viktor Yuschenko yang lebih mengarahkan hubungannya dengan barat dan mengurangi peran Rusia dalam hubungan kemitraannya. Hubungan antara Rusia dan Ukraina mulai menegang.

Hal ini terkait dengan kebijakan – kebijakan yang diambil oleh Viktor Yuschenko. Salah satunya adalah keinginan Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Rusia merupakan produsen dan eksportir utama minyak dan gas alam untuk Eropa termasuk Ukraina. Ukraina mengkonsumsi gas Rusia sebesar 60 % dan sisanya berasal dari Norwegia, Inggris, Belanda, dan Jerman. Untuk Ukraina, Rusia memberikan harga gas murah di bawah harga pasar negara – negara Eropa. Rusia memberikan tarif murah dikarenakan Ukraina merupakan bekas negara satelitnya. Selain itu, Ukraina juga merupakan jalur transit gas Rusia ke Eropa. Rusia menganggap Ukraina sebagai mitra pentingnya dalam mengirim gas ke Eropa. Dengan adanya tarif gas khusus yang diberikan Rusia, Ukraina semakin bergantung pada kebutuhan gas Rusia. Namun pada tahun 2006 Rusia dan Ukraina terlibat dalam sengketa pasokan gas. Sengketa berawal dari ketika perusahaan gas asal Rusia Gazprom pada tanggal 1 Januari 2006 menghentikan pasokan gas ke Ukraina, karena Rusia menaikkan harga gas ekspor ke Ukraina. Permasalahan berlanjut ketika perusahaan Gazprom mulai memangkas volume pengirimannya dikarenakan Ukraina tidak sanggup membayar hutang beserta dendanya. Melihat inkonsistensi perusahaan Gazprom untuk menghentikan pengiriman gasnya ke pasar Ukraina. Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya ekspor gas ke Ukraina dan menurunnya persediaan gas di Eropa.

Pasang surut kedua negara tersebut berlanjut dalam krisis Georgia terkait disintegrasi Ossetia Selatan dan Abkhazia tahun 2008. Rusia menerapkan intervensi melawan pemerintahan Georgia yang bersekutu dengan barat dan AS dalam melarang upaya disintegrasi yang dilakukan oleh masyarakat Ossetia Selatan dan Abkhazia. Armada Laut Hitam merupakan salah satu alternative bagi Rusia dalam membantu masyarakat Ossetia Selatan dan menghadapi militer Georgia.

Hubungan Rusia dan Ukraina mulai membaik kembali semenjak pemilu presiden Ukraina pada Februari 2010, dimana telah terpilih seorang pro Rusia, Viktor Yanukovich sebagai pemilik suara terbanyak. Vladimir Putin, presiden Rusia langsung menganak emaskan Ukraina dan bersahabat dengan Yanukovich. Hal ini dibuktikan saat Putin menandatangani kesepakatan dana talangan sebesar US\$15 miliar (sekitar Rp 1771.18 triliun) untuk menghadapi krisis ekonomi di Eropa kepada Ukraina lewat pertemuan pada 17 Desember 2010 di Moskowa, Rusia. Dibalik kesepakatan ini juga terselip permintaan Putin kepda Yanukovich untuk mengabaikan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa yang akan dilakukan di Eastern Partnership Summit di Vilnius, Lituania. Namun ternyata persekutuan Ukraina dan Rusia tersebut memicu kekecewaan rakyat Ukraina yang akhirnya melakukan demonstrasi besar – besaran untuk

melengserkan Presiden Viktor Yanukovich. Pihak Rusia langsung secara keras menentang pelengseran Yanukovich hingga pada 1 Maret 2014, Rusia mengadakan manuver dengan menuntut dan memenangkan persetujuan parlemen negaranya untuk menginvasi Ukraina. Setelah lengsernya rezim yanukovich Ukraina melakukan pemilihan umum untuk mengganti presiden lama dan terpilih presiden baru Ukraina Petro Poroshenko agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Presiden baru Petro Poroshenko ini lebih cenderung meningkatkan kerjasama Ukraina dengan Uni Eropa daripada dengan Rusia dilanjutkan oleh presiden ukraina sekarang yakni vlodimir zeilenski yang juga dekat dan merapat ke uni eropa menjadikan rusia geram dan melakukan serangan bersenjata pada tanggal 24 februari 2022.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat tiga faktor utama yang mengakibatkan terjadinya intervensi Rusia terhadap Ukraina yaitu faktor geopolitik, faktor demografis, dan faktor sosial-politik.
2. Intervensi yang dilakukan Rusia merupakan tindakan yang tidak sah karena melanggar prinsip non-intervensi. Adapun akibat yang timbul dari intervensi tersebut ternyata cukup beragam sanksi ekonomi dan politik.

C. Peran Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam menengahi konflik Ukraina dan Rusia

Dengan adanya PBB selama tujuh dekade terakhir, sebagian besar warga global mungkin merasa dalam zona nyaman, di mana tidak terjadi perang-perang fisik seperti sebelumnya. Namun, hal ini dipatahkan dengan operasi militer yang dilakukan Rusia ke sejumlah kota di Ukraina.

Serangan ke Ukraina oleh Rusia tersebut adalah serangan militer terbesar di Benua Eropa setelah Perang Dunia II, pun merupakan keberlanjutan dari ketegangan yang sudah ada sebelumnya antara keduanya. Serangan pada 24 Februari 2022 itu diyakini Rusia sebagai upaya menjaga rasa aman dari bayang-bayang NATO -satuan kekuatan militer negara-negara barat, di wilayah yang berbatasan langsung dengan negaranya. Selain itu, Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin mengklaim bahwa Ukraina adalah saudaranya berdasarkan latar belakang historis, yakni sebelum pecahnya Uni Soviet, dan dengan alasan itu pula Rusia melarang Ukraina untuk bergabung dengan kekuatan barat.

Kekhawatiran Rusia dengan bergabungnya Ukraina ke NATO akan membuatnya sangat rentan akan serangan barat, bisa dipahami jika dilihat dari kaca mata neorealisme. Kondisi security dilemma, kondisi di mana suatu negara berusaha meningkatkan keamanannya seperti dengan memperkuat militer, bergabung dalam aliansi dan sebagainya. Namun, tindakan ini direspon oleh negara lainnya (terlebih negara tetangganya) sebagai ancaman, sehingga ikut meningkatkan keamanannya pula untuk mengantisipasi apabila negara pertama (ataupun bersama aliansinya) melancarkan serangan. Neorealis memandang sistem internasional bersifat anarki, sehingga masing-masing negara akan berusaha untuk survive, mempertahankan eksistensinya.

Akan tetapi, tindakan Rusia tersebut tidak dapat dibenarkan sebab Ukraina saat itu bahkan baru mengungkapkan niatannya saja untuk bergabung dengan NATO. Selain itu, Ukraina maupun NATO pun tidak melakukan serangan tertentu kepada Rusia, sehingga bukan merupakan kondisi mendesak bagi Rusia untuk membombardir Ukraina.

Ukraina sudah merdeka pada 24 Agustus 1991, serta telah menjadi anggota PBB yang berarti Ukraina merupakan negara merdeka dan berdaulat. Rusia dalam hal ini dengan terang telah melanggar hukum internasional dengan menyerang wilayah kedaulatan Ukraina dan mengabaikan PBB sebagai institusi internasional yang berwenang menengahi permasalahan semacam itu.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dibentuk setelah Perang Dunia II dengan misi mewujudkan perdamaian, upaya resolusi konflik dengan negosiasi, sehingga meminimalisir dan mencegah terjadinya perang yang mengerikan dan menimbulkan kerugian besar seperti pada Perang Westphalia, Perang Dunia I dan II di masa mendatang.

Misi PBB tersebut nampaknya cukup sukses hingga Rusia memutuskan menginvasi Ukraina sejak bulan Februari lalu. PBB boleh dikatakan mati kutu, tidak berdaya saat resolusi yang dihasilkan pada forum tersebut dibatalkan oleh Rusia dengan memanfaatkan hak vetonya dalam Dewan Keamanan PBB.

Setelah invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky berpidato jarak jauh dengan penuh semangat di depan Dewan Keamanan dengan berseru agar mereka "segera bertindak" demi menghentikan aksi militer Rusia. Tapi cara organisasi itu bekerja menyulitkannya untuk bertindak di tengah insiden-insiden internasional. Ke-15 anggota dewan terdiri dari lima negara anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi atau mengizinkan penggunaan kekuatan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional.

Namun seringkali keputusan-keputusan tegas tidak bisa diambil karena diveto oleh anggota-anggota tetap yang memiliki pandangan berbeda soal isu-isu global. Lima negara anggota tetap di Dewan Keamanan yakni AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis.

Mereka adalah kekuatan yang dominan setelah kekalahan Jerman dan Jepang dalam Perang Dunia Kedua ketika dewan itu dibentuk. Komposisi itu tidak berubah sejak 1946.

PBB sebagai organisasi bermisi perdamaian internasional dengan keanggotaan hampir seluruh negara di dunia, ketika berhadapan dengan kasus kejahatan yang bahkan banyak memakan korban jiwa seperti di Ukraina, terkesan lemah saat disodorkan veto oleh Rusia, sang pelakunya sendiri? Dewan Keamanan PBB tampaknya kesulitan dalam menegakkan dan memberi sanksi terhadap pelanggaran Rusia tersebut. Sejalan dengan pernyataan direktur eksekutif Human Rights Watch Group, Kenneth Roth pada forum “High-Level Ministerial Event on Framing the Use of Veto in the Face of Massive Crimes” di Markas PBB di New York (30/9/2015), bahwa hak-hak veto yang diterapkan hingga saat ini secara tidak langsung melemahkan legitimasi Dewan Keamanan PBB (Nugraha dalam medcom.id,01/10/2015).

Baru pada jumat, 4 Maret 2022 PBB mengeluarkan resolusi terhdap keonflik yang terjadi antara ukraina dan rusia, resolusi ini dikhususkan kepada Rusia yang telah melakukan invasi adapun resolusi itu memiliki tujuh poin diantaranya :

1. "Mengecam (*deplore*) dengan istilah terkuat terhadap agresi dari Federasi Rusia melawan Ukraina, serta Mengutuk (*condemn*) deklarasi 24 Februari 2022 oleh Federasi Rusia terkait 'operasi militer khusus' di Ukraina." Resolusi itu juga meminta Rusia mengikuti Piagam PBB pasal 2 yang melarang negara anggota melanggar integritas wilayah negara lain dengan memakai kekuatan pasukan.
2. Menuntut Federai Rusia agar secepatnya dan tanpa syarat mencabut keputusan terkait status beberapa area Ukraina di Donetsk dan Luhansk. Juga menuntut bahwa Federasi Rusia secepatnya, secara menyeluruh, dan tanpa syarat, menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina di dalam batas-batas yang diakui secara internasional.
3. Menuntut bahwa Federasi Rusia secepatnya berhenti menggunakan kekuatan terhadap Ukraina dan menyetop segala ancaman di luar hukum atau menggunakan kekuatan terhadap Negara Anggota. Mengekpresikan kekhawatiran besar pada laporan-laporan serangan pada fasilitas-fasilitas sipil seperti tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit, dan korban sipil, seperti wanita, orang lansia, orang-orang dengan disabilitas, dan anak-anak.

4. PBB menegaskan tidak akan mengakui wilayah-wilayah yang direbut dengan kekuatan militer.
5. Mengingatkan tanggung jawab semua Negara di bawah Pasal 2 dari Piagam untuk menahan diri pada hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan melawan integritas wilayah atau independensi politik dari Negara manapun, atau dengan cara lain yang tak konsisten dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menyelesaikan pertikaian internasional dengan cara-cara damai.
6. Mengekspresikan kekhawatiran juga tentang potensi dampak konflik dari meningkatnya keresahan pangan secara global, sebagaimana Ukraina dan wilayah tersebut adalah salah satu area terpenting di dunia untuk ekspor gandum dan pertanian.
7. Mengutuk keputusan Federasi Rusia untuk menambah kesiapan dari pasukan nuklir mereka.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peperangan merupakan salah satu jalan yang ditempuh oleh kelompok atau suatu negara untuk menjaga eksistensinya sebagai negara yang superior juga untuk mempertahankan kekuasaan baik kekuasaan ekonomi politik dan letak geografis sekaligus menyatakan dirinya sebagai negara super power.

Pada tahun 1945 terbentuklah suatu organisasi internasional bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), munculnya PBB setelah kehancuran Perang Dunia Kedua membawa suatu misi utama yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan dari PBB membentuk misi tersebut adalah dengan harapan untuk mencegah terjadinya konflik, membantu pihak-pihak yang terlibat akan konflik dan membantu untuk mewujudkan bentuk perdamaian sebagai penjaga perdamaian dan dengan PBB diyakini akan menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan bertahannya dan terus berkembangnya perdamaian antar negara. Di dalam PBB, yang memiliki otoritas atau tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan PBB

Konflik dan invasi Rusia atas Ukraina sudah dimulai dari pasca bubarnya uni soviet dimana ada beberapa kejadian yang satu sama lain bersinggungan yang melahirkan konflik ini serta ketegangan ketegangan Rusia Serta ukraina selalu di pengaruhi oleh penanaman pengaruh dua ideologi besar yakni komunis dan kapitalis, beberapa kali ketegangan ketegangan yang terjadi bisa reda takala ukraina mendekat dan pro Rusia yang notabene berhaluan sosialis komunis namun beda lagi cerita ketika ukraina mendekat ke front barat sebutlah NATO maka konflikpun pecah lagi.

Sampai sejauh ini peran PBB sebagai organisasi internasional dirasa kurang karena belum berani memberikan sanksi yang memberatkan Rusia sehingga penyerangan terhadap ukraina sampai hari ini masih terus terjadi, walaupun PBB sudah membuat resolusi terhadap invasi Rusia namun jatuhnya hanya sekedar kecaman belaka untuk menghindari kecaman negara dunia terhadap PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Sastroamidjojo, 1971, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Batara, Jakarta. Malcolm N. Shaw QC, 2013, Hukum Internasional, Cetakan I, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1990, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan Ketujuh, Binacipta, Bandung T.
- May Rudy, 2006, Hukum Internasional 1, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung
- Danial "Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional"
- jurnal ilmu dan budaya Jurnal Nazi Marupa Hasudungan Sianturi "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antar Jerman dengan Italia".
- Nyoman Sudira "Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik" (Jurnal Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan

Internet

- The Tatar Crimea siap untuk menolak upaya oleh penolakan otonomi dari Ukraina - . CuBar UNIAN, 2014/02/16." Unian.net
- <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/05/0331146/Putin.Pengerahan.Tentar.a.ke.Ukraina.adalah.Pilihan.Paling.Akhir>
- http://indonesia.rbth.com/multimedia/infographics/2014/03/07/penggunaan_bahasa_rusia_di_ukraina_23357.
- html <http://vibiznews.com/2014/03/06/mengenal-crimea-penyebab-ancaman-perangrusia-dan-ukraina/>
- <http://www.gmni.or.id/1143/ukraina-dalam-perspektif-geopolitik-zbigniewbrzezinski.html>